

POHON KINERJA			PENERJEMAHAN KEDALAM RENSTRA 2025-2029								DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN DAN SASARAN				PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI KEPMENDAGRI 3406)					
			TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN		
Kinerja Strategis : Menurunnya Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Menurunnya Risiko Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	Indeks					Tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut dengan tingkatan	Indeks risiko bencana dihitung dengan menggabungkan nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas, dengan rumus umum Risiko Bencana = Bahaya x Kerentanan x Kapasitas Nilai ini didasarkan pada data dan dokumen pendukung yang dihimpun oleh daerah
Kinerja Urusan : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks					Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah	Perhitungan penilaian indeks ketahanan daerah dengan 71 indikator sesuai dengan yang tercantum pada petunjuk teknis perangkat penilaian indeks ketahanan daerah dari BNPB
Kinerja Taktikal 1: Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	%					1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	Jangkauan layanan informasi rawan bencana terhadap warga negara usia 15 s/d 64 tahun di daerah rawan bencana berupa sosialisasi tatap muka, media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/KelurahanTangguh Bencana	Jumlah warga negara di daerah rawan bencana usia 15 s/d 64 tahun yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara di daerah rawan bencana usia 15 s/d 64 tahun x 100 %
Kinerja Taktikal 1.1 : Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%					1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	Pemenuhan Pelayanan informasi rawan bencana kepada warga negara usia 15-64 tahun berupa kegiatan sosialisasi tatap muka, media sosial media dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik Permendagri No. 121 Tahun 2018	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan x 100 %

<u>Kinerja Operasional :</u> Terlaksananya sosialisasi KIE bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh sosialisasi KIE rawan bencana	Orang						1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar pemberian informasi dan edukasi bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan
								1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Permendagri No. 101 Tahun 2018 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman,kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Taktikal 1.2 :</u> Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%						1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Permendagri No. 101 Tahun 2018 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana meliputi pelatihan, gladi, simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana : Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana sesuai target yang ditetapkan x 100 %
												Permendagri No. 121 Tahun 2018	

Kinerja Operasional : Tersusunnya dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Jumlah dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Dokuman					1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana adalah penyediaan dokumen perencanaan sah dan legal yang bersifat strategis dan menjadi acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi. Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan
							1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan penyediaan dokumen sah dan legal yang menggambarkan kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan
							1.05.03.2.02..0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	Rencana Kontijensi adalah suatu proses perencanaan kedepan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah dokumen rencana kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun pada tahun bersangkutan

<u>Kinerja Operasioanal</u> : Tersedianya SDM pengurangan risiko bencana	Jumlah SDM pengurangan risiko bencana yang tersedia	Orang						1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. seperti: Desa Tangguh Bencana, Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, dsb..., dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Operasioanal</u> : Tersedianya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana sesuai ancaman bencana	Unit						1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	Penguatan Tata Kelola Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana adalah penyediaan laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) yang sah dan tersedia untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll).	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Operasional</u> : Tersedianya sistem peringatan dini per ancaman bencana	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit										Permendagri No. 101 Tahun 2018	

Kinerja Operasional : Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM kebencanaan	Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan	Orang					1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana warga negara maupun aparatur di kawasan rawan bencana untuk meningkatkan pemahamannya tentang kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, desa dan keluarga tangguh bencana, serta Forum PRB di daerah, dengan alat ukur jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan.	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten / Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada tahun bersangkutan
Kinerja Operasional : Terlaksananya gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah partisipasi aparatur dan masyarakat yang mengikuti gladi	Orang					1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya, dengan alat ukur jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota pada tahun bersangkutan
							1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	PP No. 21 Tahun 2008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana adalah peningkatan kompetensi berupa kemampuan kerja yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan kecakapan dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana pada tahun bersangkutan
Kinerja Taktikal 2: Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%					1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat bencana terjadi untuk mengendalikan ancaman dan mengurangi dampak yang ditimbulkan, meliputi penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan.	Jumlah korban yang mendapatkan penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan x 100 %

Kinerja Taktikal 2.1 : Terlaksananya Penguatan Sistem Penanganan Bencana	1. Persentase Sumber Daya Pendukung Penanganan Bencana sesuai standar 2. Persentase Dokumen Tata Kelola Penanganan Bencana yang diimplementasikan						1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Persentase Sumber Daya Pendukung Penanganan Bencana sesuai standar 2. Persentase Dokumen Tata Kelola Penanganan Bencana yang diimplementasikan	Persen	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, dan menyelamatkan nyawa manusia yang terancam atau terkena dampak bencana serta memindahkan korban dari lokasi bahaya ke tempat yang aman untuk mendapatkan pertolongan medis lanjutan.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana : Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100 %
Kinerja Operasional : Terlaksananya respon cepat siaga dan darurat bencana	Jumlah status darurat bencana yang ditetapkan	Status darurat					1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Dokumen	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan penanganan awal untuk penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB. Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat pada tahun bersangkutan
Terlaksananya koordinasi sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB)	Jumlah posko dan petugas penanganan darurat bencana	posko dan petugas										
Kinerja Operasional : Terlaksananya pendataan korban bencana	Jumlah warga yang menjadi korban bencana	Orang										
Kinerja Operasional : Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi	Orang					1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Orang	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman, dengan alat ukur jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana. Permendagri No. 101 Tahun 2018	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana pada tahun bersangkutan

<u>Kinerja Operasional</u> : Tersedianya logistik bagi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik	Orang					1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah pendistribusian loogistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis). Perban No. 4 Tahun 2018	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Operasional</u> : Tersedianya dokumen tata kelola penanganan bencana	Jumlah regulasi/ kebijakan teknis dalam upaya penanggulangan/ penangan an bencana	kebijakan teknis					1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah / legal	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah PP No. 21 Tahun 2008	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah / legal pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Operasional</u> : Terlaksananya koordinasi dengan OPD teknis terkait penanggulangan bencana	Jumlah koordinasi dengan OPD teknis terkait penanggulangan bencana	Laporan					1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis PP No. 21 Tahun 2008, Perka BNPB No. 4 Tahun 2016	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten / Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Taktikal 3</u> : Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang ditindaklanjuti	%					1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang ditindaklanjuti	Persen	Serangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun : Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang seharusnya disusun x 100 %
<u>Kinerja Taktikal 3.1</u> : Tersedianya dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sesuai standar	Persentase dokumen JITUPASNA dan R3P yang tersedia sesuai standar						1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen JITUPASNA dan R3P yang tersedia sesuai standar	Persen	Pengaturan dan pemetaan struktur dasar yang mendasari upaya penanggulangan bencana melibatkan perencanaan (penyusunan dokumen JITUPASNA, R3P), koordinasi, dan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan mempercepat pemulihan setelah bencana	Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun : Jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang seharusnya disusun x 100 %

<u>Kinerja Operasional :</u> Terlaksananya koordinasi pascabencana	Jumlah koordinasi pascabencana	Laporan						1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	Facilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor. Pp No. 21 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB No. 6 Tahun 2017	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan pada tahun bersangkutan
								1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan adalah penyediaan data dan informasi kebencanaan (penyediaan secara bersama ataupun mandiri) dalam pemasangan, pengembangan dan perawatan sistem informasi kebencanaan. Perka BNPB No. 8 Tahun 2011, dan Perka BNPB No. 7 Tahun 2012	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja Operasional :</u> Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan	Dokumen						1.05.03.2.04.0003	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota adalah inisiasi, optimalisasi, dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perka BNPB No. 11 Tahun 2014, dan Perka BNPB No. 12 Tahun 2014	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana pada tahun bersangkutan
<u>Kinerja operasional :</u> Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana							1.05. .03.2.04.0005	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	Penyusunan laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam hal kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota, terkait perencanaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah laporan hasil binwas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun bersangkutan

